



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

Jalan Prapanca Raya No.9 Telepon 72789159,
J A K A R T A

Kode Pos : 12170

Nomor : e-0030/PU.04.00
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pelaksanaan Posko Pengaduan
Masyarakat di Kantor Walikota
Bulan Maret 2026

10 April 2026

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah
Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Menindaklanjuti Instruksi Gubernur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pengaduan Masyarakat di Kantor Walikota/Bupati, Camat dan Lurah, bersama ini disampaikan laporan hasil pelaksanaan posko pengaduan masyarakat di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat melalui posko pengaduan masyarakat di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan pada Bulan Maret 2026 sebanyak **1 (satu)** aduan/laporan;
2. Dokumentasi pelaksanaan posko pengaduan masyarakat di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



M Anwar

NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Walikota
Kota Administrasi Jakarta Selatan
Nomor : e-0030/PU.04.00
Tanggal : 10 April 2026

**Pelaksanaan Penerimaan Pengaduan Masyarakat
Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan**

**A. Data Posko Pengaduan Masyarakat Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Bulan Maret 2026**

No	Kode Laporan	Kanal Aduan	Tanggal Masuk Laporan	Deskripsi Laporan	Kewenangan SKPD/UKPD	Status Laporan	Keterangan Hasil Tindak Lanjut
1	WL260325CB6B	Posko Pengaduan Masyarakat Walikota	25 Maret 2026	Kronologis : 1. Sebelum 24 Januari Pak RT datang meminta tanda tangan persetujuan pembangunan secara parsial. Kami menyarankan diadakan pertemuan agar ada kejelasan. 2. Pada 24 Januari Pak RT mengirim foto rencana pembangunan padel dan rencana pertemuan, namun batal karena salah satu warga sakit. 3. Pada Tanggal 27 Februari – 12 Maret Kami menyerahkan draft Surat Pernyataan persetujuan pembangunan (hasil konsultasi dengan pejabat DKI). Hingga tanggal 12 Maret tidak ada tanggapan. 4. Pada tanggal 12 Maret (pagi) Ditemukan pembangunan sudah berjalan tanpa persetujuan kami. Dampak nya : rumah kami mengalami kebocoran. 5. Konfirmasi ke RT dan Pak RT menyatakan pembangunan sudah memenuhi syarat berdasarkan keterangan kontraktor.	DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN	Selesai	Telah dilakukan survei lapangan, dan diketahui bahwa kegiatan pekerjaan telah berhenti/tidak terdapat aktivitas. Terhadap bangunan dimaksud telah diberikan tindakan sebagai berikut: - SP1 Nomor 0583/e/SP1/JS/TBT/I/2026/AT.13.01 tanggal 22-01-2026 - SP2 Nomor 0968/e/SP2/JS/TBT/II/2026/AT.13.01 tanggal 05-02-2026 - SP3 Nomor 1457/e/SP3/JS/TBT/II/2026/AT.13.01 tanggal 24-02-2026 - SPPK Nomor 1786/e/SPPK/JS/TBT/III/2026/AT.13.01 tanggal 05-03-2026 - SPPPKT Nomor 2134/e/SPPKT/JS/TBT/III/2026/AT.13.01 tanggal 16-03-2026 Adapun persyaratan izin tetangga merupakan salah satu ketentuan yang

No	Kode Laporan	Kanal Aduan	Tanggal Masuk Laporan	Deskripsi Laporan	Kewenangan SKPD/UKPD	Status Laporan	Keterangan Hasil Tindak Lanjut
				6. Keberatan Warga, Kami menyampaikan bahwa persetujuan harus ditandatangani seluruh warga terdampak dalam form resmi Pemprov DKI, dan kami belum pernah menandatangani. 7. Ke Kecamatan Tebet, Hasil klarifikasi : a. Persetujuan warga terdampak wajib tanda tangan form resmi Pemprov DKI b. RT menyatakan syarat sudah terpenuhi, namun kami belum pernah menandatangani. c. Kewenangan ada di Wali Kota Jakarta Selatan, bukan Kecamatan 8. Permasalahan Utama yaitu : a. Proses pembangunan berjalan tanpa persetujuan lengkap warga terdampak b. Ada dugaan ketidaksesuaian/indikasi pemalsuan tanda tangan 9. Pertanyaan a. Apakah proses tetap sah jika ada warga terdampak yang belum tanda tangan? b. Apakah kami berhak melihat dokumen persetujuan untuk memastikan keabsahan tanda tangan?			harus dipenuhi dalam proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk lapangan padel.

* Dokumentasi aduan dapat dilihat pada tautan : "<https://crm.jakarta.go.id/>" lalu memasukkan Kode Laporan

**B. Dokumentasi Pengaduan Masyarakat Yang Diterima Melalui Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
Pada Aplikasi *Citizen Relation Management* (CRM)**

 Selamat Siang, aduan walikota.js

Monitoring Laporan

Monitoring Kinerja

Aduan Wilayah

Riwayat Aduan Wilayah

Filter

Nomor laporan	Dinas/SKPD	Kategori	Tanggal terima	Status	Privasi
WL260325CB6B	SUDIN CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN JAKARTA SELATAN	Tata Ruang dan Bangunan	25 Mar 2026	SELESAI	Publik

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



M Anwar
NIP 196605281998031003

Dokumentasi
Pelaksanaan Posko Pengaduan Masyarakat
di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



**Dokumentasi
Pelaksanaan Posko Pengaduan Masyarakat
di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan**



Dokumentasi
Pelaksanaan Posko Pengaduan Masyarakat
di Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

